

Katalog : 7102012.1204

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2015



IKK KABUPATEN TAPANULI TENGAH

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2015

ISBN : 978-602-1113-91-2

No. Publikasi : 12040.1648

Katalog : 7102012.1204

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman : viii + 40 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Ilustrasi Kover:

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Dicetak oleh

CV RILIS GRAFIKA (Oktober 2016)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum : Alzen, S.Si., M.Si

Penanggungjawab Teknis : Gusli Tanjung, SE

Penyusun : Vicera Romindo Toga Torop, SST

Editor : Juhar Monang S. Tambun, SST

Koordinator Gambar

dan Tata Letak : Evalinda Margaretha, SST

Gambar Kulit : Evalinda Margaretha, SST

Tata Letak : Evalinda Margaretha, SST

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>

KATA PENGANTAR

Kebutuhan akan data yang akurat, objektif tanpa rekayasa, serta terkini dewasa ini semakin diminati dan ditunggu-tunggu, tidak terbatas hanya pada instansi pemerintah dan pengambil kebijakan, namun telah merambah hingga pada masyarakat luas. Sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), Indikator Kemahalan Konstruksi yang dihitung berdasarkan letak geografis menjadi data yang ditunggu kehadirannya. Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015 berguna memberikan data yang akurat dimaksud, khususnya untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kemahalan konstruksi yang dibedakan menjadi 5 jenis bangunan, yaitu: (1) bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; (2) bangunan untuk prasarana pertanian; (3) bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan; (4) bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; dan (5) bangunan lainnya.

Informasi di atas tentunya sangat dibutuhkan secara berkesinambungan, baik pemerintah, peneliti, maupun dunia usaha. Untuk memenuhi kebutuhan data yang semakin beragam tersebut, BPS Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya untuk menyusun publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal penyediaan data dan penyusunan publikasi ini. Kami berharap kritik dan saran guna perbaikan publikasi di masa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen data.

Pandan, Oktober 2016
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala,



Alzen, S.Si, M.Si
NIP 19611117 198303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konsep dan Definisi	2
1.3. Metode Penghitungan	3
1 4. IKK 2015	10
BAB II PEMBAHASAN	11
2.1. Gambaran Umum	11
2.2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015	14
2.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	19

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Perbedaan IKK dan IHPB	12
Tabel	2.2	Perbandingan Antara IKK 2007 – IKK 2015.....	13
Tabel	2.3	IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2014 dan 2015.....	14
Tabel	2.4	IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2014 dan 2015.....	17
Tabel	2.5	IKK Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia Tahun 2015.....	20

DAFTAR GRAFIK

		Halaman	
Grafik	2.1	IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2014-2015.....	15
Grafik	2.2	Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan Tahun 2014-2015.....	19
Grafik	2.3	IKK Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Acuan Tahun 2014-2015.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2015	22
Lampiran 2 Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK 2015	27

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan Pembangunan Nasional secara merata dan adil di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang Otonomi Daerah (Otda) untuk mendorong percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, efektif serta efisien. Sejak dikeluarkannya kebijakan Pemerintah tentang Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan data hingga level/tingkat kabupaten/kota sebagai indikator pembangunan.

Kebijakan Otonomi Daerah ini selain dapat mendorong percepatan pembangunan juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utamanya adalah sebagai pemerataan keuangan antar daerah. Dengan harapan, kebijakan Otonomi Daerah dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal dan terbelakang, baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alamnya. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepala daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di daerah perlu didukung dengan penyediaan statistik yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan harus memenuhi kriteria: a) mempunyai kredibilitas tinggi; b) mutakhir; dan c) mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU di suatu kabupaten/kota adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota yang merupakan pendekatan terhadap keadaan geografis suatu wilayah. IKK pertama kali dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

1.2 Konsep dan Definisi

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) adalah cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK dihasilkan melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota atau provinsi adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi acuan untuk periode waktu tertentu.

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan/konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama. Dengan demikian, penghitungan IKK harus dilakukan secara *comparable* dan *representative*. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kelompok bangunan. Untuk keperluan DAU yang digunakan adalah IKK umum yang merupakan angka tertimbang dari ketiga kelompok jenis bangunan tersebut.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti IHPB atau IHK, dimana indeks periodikal merupakan angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar. Sejak tahun 2005 dalam penyajian IKK diperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar yaitu Februari 2004 (sesuai dasar penghitungan IKK 2004).

1.3 Metode Penghitungan

Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi hingga tahun 2009 disajikan dengan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator sehingga diperoleh angka provinsi dan kabupaten/kota. Namun sejak tahun 2010, penghitungan IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100.00 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 508 kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Surabaya sebagai dipilih sebagai kota acuan penghitungan IKK pada tahun 2010.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan *flexibilitas* dalam penghitungan IKK apabila terjadi

penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKNya, sebagaimana literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

Dalam melakukan penghitungan IKK dibutuhkan data/komponen penunjang, seperti paket komoditas, diagram timbang, dan data harga-harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Adapun metodologi penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi yang akan dipaparkan dalam publikasi ini antara lain mencakup:

1. Paket Komoditas IKK

Pengertian paket komoditas IKK dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2015, diasumsikan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 47, terdiri dari 33 jenis bahan bangunan dan 6 sewa alat berat, dan 8 jasa konstruksi.

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2015 terdiri dari 33 jenis barang dan 6 sewa alat berat yang dipilih dari 60 jenis barang dan 6 sewa alat berat yang terdapat dalam daftar HPB-K. Adapun jenis barang dan sewa alat berat tersebut yaitu: tanah urug, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, seng gelombang, paku, semen portland, besi beton, bak mandi fiber, kloset, seng plat, pipa PVC, kayu balok, kayu papan, kayu lapis, cat emulsi, cat minyak, tegel/keramik, genteng/atap, kaca, aspal, gypsum, kabel, bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II, mesin pompa air, rangka atap baja, aluminium, tangki air fiber, lampu, mcb, *excavator*, *bulldozer/tracked tractor*, *skid steer loader*, *tandem vibrating roller*, *compact tract loader*, *dump truck* dan jasa-jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang digunakan diantaranya: upah mandor, upah kepala tukang, upah tukang kayu, upah tukang batu, upah tukang cat, upah tukang listrik, pembantu tukang, dan upah lainnya.

Jenis-jenis barang konstruksi, sewa alat berat, serta jasa konstruksi seperti yang disebutkan tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar. Disamping itu, data harga barang-barang *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. *Bill of Quantity*

Penghitungan IKK kabupaten/kota tahun 2015 ini menggunakan dua jenis penimbang, yakni *Bill of Quantity* dan diagram timbang IKK umum. *Bill of Quantity* kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis bangunan.

Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- c. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut:

- a. **Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kegiatan konstruksi yang termasuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah sebagai berikut:**
 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- b. **Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, kegiatan konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah:**
 1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/ pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- c. **Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk pertanian, instalasi listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya, diantaranya:**

1. Pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.
2. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
3. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
4. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
5. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
6. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase pada gedung.
7. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
8. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
9. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
10. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
11. Bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman).

Pada tahun-tahun sebelumnya, penghitungan IKK seluruh kabupaten/kota dan provinsi menggunakan 5 (lima) kelompok jenis bangunan, yang antara lain:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Prasarana untuk pertanian;
- c. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

e. Bangunan lainnya.

Namun, sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 penghitungan IKK hanya menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan. Kelompok jenis bangunan yang tidak diikutsertakan adalah bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, serta kelompok jenis bangunan sarana pertanian yang digabung dengan kelompok jenis bangunan lainnya.

Perubahan pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/*comparable*. Kelompok jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi tidak diikutsertakan, dikarenakan kualitas barang-barang dalam kelompok jenis bangunan tersebut sangat beragam antar kabupaten/kota. Sedangkan kelompok jenis bangunan sarana pertanian, tidak relevan lagi digunakan untuk daerah perkotaan.

Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok jenis bangunan dapat berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2015 menggunakan data Realisasi APBD tahun 2014. Cara penyusunan diagram timbang umum IKK sama dengan cara penyusunan diagram timbang IHPB bahan bangunan/konstruksi umum yang intinya adalah memilih pengeluaran untuk pembangunan fisik dan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok jenis bangunan.

3. Harga Jenis Bahan Bangunan/Sewa Alat dan Jasa

Data harga yang digunakan untuk penghitungan IKK Tahun 2015 adalah harga barang-barang konstruksi yang pada 4 (empat) tahapan, yakni periode bulan Juli dan Oktober 2014 serta Januari dan April 2015. Data harga tersebut dikumpulkan melalui survey serentak paket komoditas IKK yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan

di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei harga dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 30 di untuk setiap tahapan, yang setidaknya dikumpulkan dari 3 (tiga) pedagang besar barang/jasa konstruksi yang dianggap mewakili tingkat harga di pasaran.

Pada kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi sampel survei ini adalah UD Sahata, UD SHB, dan UD Rahmad. Responden yang dipilih dalam survei IKK di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 3 (tiga) toko ini dianggap telah mewakili kondisi harga pasar bahan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, dikumpulkan pula data sewa alat berat dan jasa dari kontraktor ataupun dari instansi terkait yang menyediakan jasa sewa alat berat konstruksi. Responden untuk data ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. Rumus Penghitungan IKK

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKK_{kj})

Untuk mendapatkan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) menurut kelompok jenis bangunan kabupaten/kota adalah mengalikan bobot dengan harga masing-masing bahan bangunan tersebut. Agar memperjelas penghitungan TKK kabupaten/kota seperti yang telah diuraikan di atas, berikut ini disajikan dalam bentuk notasi matematis.

$$TKK_{kj} = \sum_{i=1}^m P_i \cdot Q_{ij}$$

dimana:

- i : Jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat
- TKK_{kj} : Tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi kelompok jenis bangunan j kabupaten/kota k
- P_i : Harga jenis barang/bahan bangunan i
- Q_{ij} : Kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke- j
- $\sum_{i=1}^m P_i \cdot Q_{ij}$: Diagram timbang kelompok jenis bangunan

b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional (TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^n TKK_{kj}}{N}$$

dimana:

k : Kabupaten/kota

TKK_{nj} : Tingkat kemahalan Konstruksi nasional n untuk kelompok jenis bangunan ke- j

N : Jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia

c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKK_{kj})

$$IKK_{kj} = \frac{TKK_{kj}}{TKK_{nj}} \times 100$$

dimana:

IKK_{kj} : Indeks kemahalan konstruksi kelompok jenis bangunan j kabupaten/kota k .

d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKK_{ku})

$$(IKK_{kab}) = \sum_{j=1}^3 (IKK_{kj} \cdot Q_j)$$

$$IKK_{ku} = \frac{(IKK_{kab})_k}{(IKK_{kab})_{Kota Samarinda}} \times 100$$

dimana:

IKK_{ku} : Indeks kemahalan konstruksi umum u kabupaten/kota k

Q_j : Diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

1.4. IKK 2015

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu dimulai tahun 2013, penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2015 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan BoQ sampai tahun 2014.

IKK tahun 2015 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat, dan upah tenaga kerja yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2014, akhir Oktober 2014, akhir Januari 2015, dan akhir April 2015. Periode-periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga dapat menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

BAB II

PEMBAHASAN

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penghitungan IKK mutlak dilakukan karena IKK digunakan sebagai salah satu komponen/penimbang dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) tiap-tiap kabupaten/kota. Penghitungan IKK telah mempertimbangkan variasi harga-harga barang/jasa konstruksi yang beragam berdasarkan keadaan dan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Demi pembagian DAU yang adil dan merata berdasarkan tingkat kesulitan letak geografis suatu wilayah tersebut, maka IKK hadir sebagai indeks spasial yang mutlak diperlukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga akhir 2009, Badan Pusat Statistik masih melakukan penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. IHPB ini sendiri dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai angka indeks yang dapat digunakan sebagai eskalasi (pertambahan dalam kuantitas/volum/jumlah) nilai proyek konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dapat didefinisikan sebagai angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. IHPB termasuk dalam indeks periodikal sama seperti indeks harga konsumen (IHK), yakni angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

Dalam perkembangannya, IHPB tidak lagi menjadi angka indeks yang wajib dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan oleh ketersediaan proyek berskala besar dan nasional yang tidak sama/berbeda-beda dari seluruh kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota dengan nilai pembangunan dan kontrak yang besar tentunya memerlukan angka indeks ini sebagai acuan eskalasi nilai proyek yang harus diperhitungkan dan diprediksi. Atas dasar cakupan yang besar (42 jenis barang dan 4 sewa alat berat pada tahun 2008) menjadikan IHPB tidak lagi mutlak dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Berikut ditampilkan perbedaan IKK dan IHPB:

Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB

No	IKK (<i>Spatial Index</i>)	No	IHPB (<i>Periodical Index</i>)
1.	Membandingkan harga untuk lokasi berbeda pada waktu yang sama	1.	Membandingkan harga untuk lokasi yang sama pada waktu yang berbeda
2.	<i>Reference</i> /dasar: rata-rata nasional	2.	<i>Reference</i> /dasar: tahun dasar
3.	Perbandingan harga antar wilayah	3.	Perubahan harga antar waktu
4.	Perbedaan struktur harga relatif besar	4.	Perubahan struktur harga relatif kecil
5.	<i>Comparability</i> dan <i>representative</i> sulit diperoleh	5.	<i>Comparability</i> dan <i>representative</i> mudah diperoleh

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKK memberikan solusi atas perbedaan tingkat harga pada berbagai lokasi dalam waktu yang sama, sehingga nilai IKK seluruh kabupaten/kota telah memperhitungkan tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah pada saat yang bersamaan, walaupun keterbandingan dan keterwakilan komoditas barang sulit diperoleh. Hal ini disebabkan karena komoditas suatu barang di suatu daerah dengan kualitas dan kuantitas tertentu memang belum tentu dimiliki oleh daerah lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Pada penghitungan IKK untuk komoditas yang tidak ada di suatu daerah, tidak boleh membuat rujukan harga kabupaten/kota tetangga yang bersebelahan sebagai acuan harga barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan memperhitungkan ongkos/biaya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang tersebut. Jadi yang menjadi acuan harga adalah semua komoditas yang ada beredar dan dijumpai di pasaran di suatu kabupaten/kota.

Tabel 2.2 berikut menyajikan perbandingan ruang lingkup, paket komoditas, serta kelompok jenis bangunan (diagram timbang) yang digunakan dalam penghitungan IKK dari tahun ke tahun (2006 – 2015).

Tabel 2.2 Perbandingan Antara IKK 2007 – IKK 2015

No.	KETERANGAN	Tahun								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ruang Lingkup: Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Provinsi	456	457	477	491	491	491	491	505	508
2.	Paket Komoditas: (jumlah barang dan sewa alat berat)	22	22	21	21	22	39	39	39	39
3.	Kelompok jenis bangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat *trend* perkembangan jumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun yang tentunya juga disertai dengan penghitungan IKK untuk tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi. Tahun 2015 ruang lingkup penghitungan IKK mencakup 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

Penghitungan IKK pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2002, yakni untuk memperoleh besaran angka IKK tahun 2004 dari 370 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Seiring dengan perkembangan tersebut, paket komoditas barang dan sewa alat berat juga mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jumlah paket komoditas barang dan sewa alat berat terbanyak yang dikumpulkan adalah pada tahun 2013 hingga tahun 2015, yakni sebanyak 39 jenis barang dan sewa alat berat. Sedangkan untuk kelompok jenis bangunan (diagram timbang) dari tahun 2007 hingga tahun 2015 konstan sebanyak 3 (tiga) jenis kelompok bangunan. Hanya tahun 2004 saja kelompok jenis bangunan yang digunakan sebagai diagram timbang sebanyak 5 (lima) kelompok/jenis.

2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015

Hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014 dan 2015, dimana Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai kota acuan di tahun 2014, dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai kota acuan di tahun 2015 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2014 dan 2015

Kabupaten / Provinsi	Indeks Umum	
	2014	2015
Tapanuli Tengah	87,30	98,08
Sumatera Utara	96,08	102,54
Kota Acuan	100,00*	100,00**

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

Catatan:

*) Kota Samarinda

***) Kota Surabaya

Indeks Kemahalan Konstruksi umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di tahun 2015 adalah sebesar 98,08. Angka lebih rendah 4,46 poin jika dibandingkan dengan IKK umum Provinsi Sumatera Utara (102,54), dan juga lebih rendah 1,92 poin dibandingkan dengan IKK Kota Surabaya sebagai kota acuan (100,00). IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa persentase tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Kota Surabaya pada tahun 2015 lebih tinggi dibanding persentase tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap kota Samarinda di tahun 2014.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan selisih sebesar 4,46 poin yang mungkin disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Harga komoditi konstruksi terutama harga barang galian dasar yang lebih rendah. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal

dan sebagainya hingga ke penggunaan peralatan berat. Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Tapanuli Tengah sendiri tanpa harus didatangkan dari luar kabupaten, seperti pasir, batu dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Sumatera Utara.

2. Upah tenaga kerja konstruksi yang lebih rendah.
3. Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah yang lebih mudah untuk mendatangkan komoditi konstruksi dari provinsi lain, misalnya Sumatera Barat.

Berikut disajikan besaran IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Samarinda sebagai kota acuan di tahun 2014 dan Kota Semarang sebagai kota acuan di tahun 2015 dalam visualisasi diagram batang.

Grafik 2.1 IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2014-2015



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, terlihat bahwa di tahun 2014 IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah dari pada Kota Samarinda yang adalah kota acuan IKK dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah 2015

selisih sebesar 12,7 poin. Sama halnya pada tahun 2015 dimana IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah dari pada Kota Surabaya yang dalah kota acuan IKK dengan selisih sebesar 1,92 poin. Hal ini diinterpretasikan bahwa untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Tapanuli Tengah masih lebih murah dibandingkan dengan membangun satu unit bangunan di Kota Samarinda di tahun 2014 dan kota Surabaya di tahun 2015. Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014, membangun satu unit bangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah 1,14 kali lebih murah dibandingkan di Kota Samarinda dan di tahun 2015 1,02 kali lebih murah dibanding Kota Surabaya.

IKK umum tertinggi pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara, dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan yakni sebesar 108,96, dan terendah di Kota Tebing Tinggi yakni sebesar 85,57 dengan *range* antara IKK umum tertinggi dan terendah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,39. Hal ini menggambarkan tingkat kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Nias Selatan 1,27 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kota Tebing Tinggi.

Penyebab IKK Kabupaten Tebing Tinggi lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara karena kondisi geografisnya yang baik sehingga memungkinkan jangkauan transportasi ke manapun, sedangkan Kabupaten Nias Selatan dari sisi kondisi geografis kurang mendukung kelancaran akses terhadap penyediaan bahan-bahan kelompok bangunan secara umum, meskipun untuk komoditas tertentu kabupaten ini memproduksi sendiri. Kesulitan dalam pendistribusian barang konstruksi menyebabkan ongkos dan harga jual meningkat, sehingga angka indeks yang dihasilkan cenderung menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang lebih mudah dalam hal akses transportasi. Berikut disajikan besaran IKK kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berikut peringkatnya dalam provinsi pada tahun 2015:

**Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi
Tahun 2014 dan 2015**

Kabupaten/Kota		2014		2015	
		Indeks Umum	Ranking Dalam Provinsi	Indeks Umum	Ranking Dalam Provinsi
1	Nias	89.54	26	102,63	7
2	Mandailing Natal	101.02	14	91,54	24
3	Tapanuli Selatan	111.97	6	97,88	16
4	Tapanuli Tengah	87.30	28	98,08	15
5	Tapanuli Utara	101.53	13	97,47	19
6	Toba Samosir	114.86	3	97,66	17
7	Labuhan Batu	89.73	25	96,68	20
8	Asahan	100.54	16	88,76	30
9	Simalungun	91.34	24	99,81	12
10	Dairi	80.47	33	100,44	9
11	Karo	95.36	23	99,39	13
12	Deli Serdang	103.36	11	99,18	14
13	Langkat	82.90	30	89,63	29
14	Nias Selatan	107.24	9	108,96	1
15	Humbang Hasundutan	107.86	8	90,22	27
16	Pakpak Bharat	112.23	5	95,45	21
17	Samosir	122.79	1	103,39	5
18	Serdang Bedagai	99.28	19	88,23	31
19	Batu Bara	100.85	15	90,26	26
20	Padang Lawas Utara	81.16	31	100,32	2
21	Padang Lawas	80.99	32	100,13	3
22	Labuhan Batu Utara	116.96	2	97,63	10
23	Labuhan Batu Selatan	98.72	20	91,60	11
24	Nias Utara	113.49	4	108,39	23
25	Nias Barat	98.35	21	108,03	18
71	Sibolga	103.63	10	103,39	6
72	Tanjung Balai	102.22	12	87,96	32
73	Pematang Siantar	89.50	27	101,08	8
74	Tebing Tinggi	97.22	22	85,57	33
75	Medan	87.26	29	90,16	28
76	Binjai	100.17	17	92,55	22
77	Padang Sidempuan	109.99	7	90,44	25
78	Gunung Sitoli	99.79	18	106,47	4

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat merupakan 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki indeks terbesar masing-masing 108,96; 108,39; dan 108,03. Sementara 3 (tiga) kabupaten/kota dengan nilai indeks terendah adalah Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan IKK masing-masing 85,57, 87,96, dan 88,23.

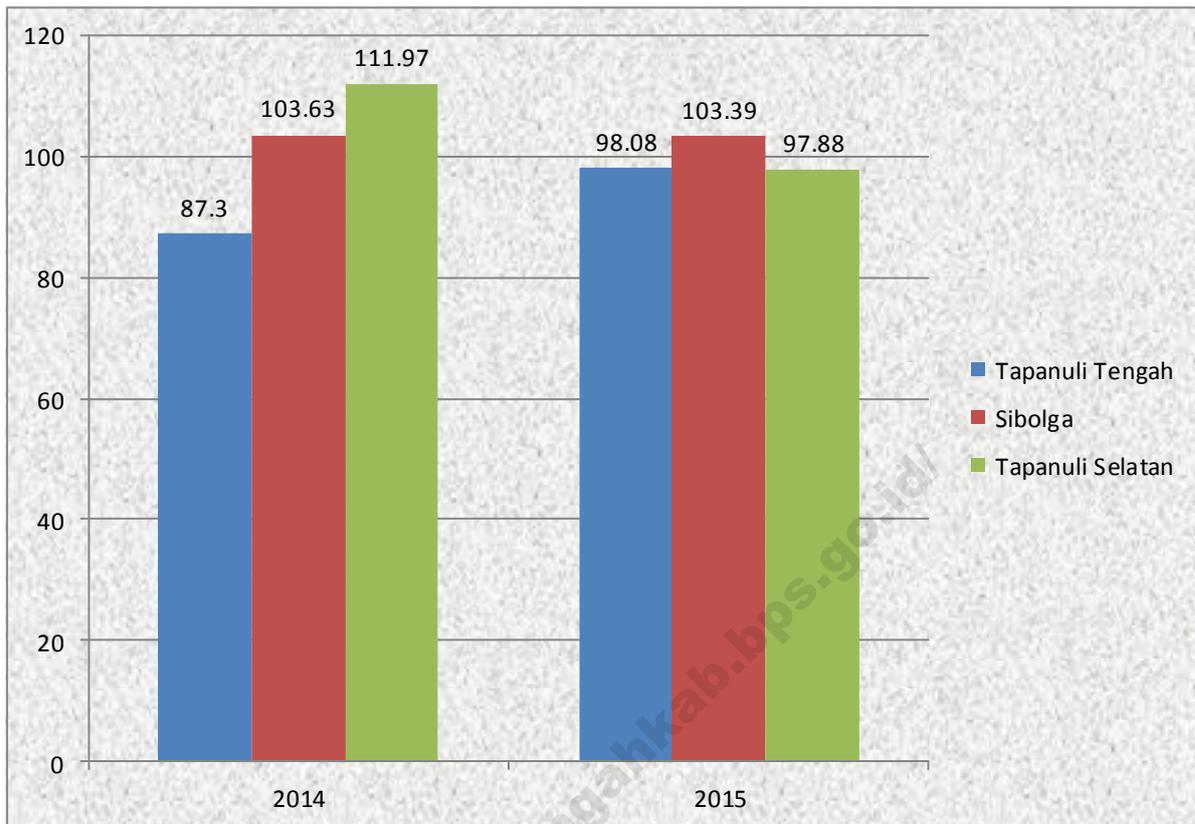
Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2015 menempati peringkat ke-15 termahal (lima belas) dengan besaran IKK 98,08. Secara umum, angka IKK ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka membangun di Kabupaten Tapanuli Tengah menduduki peringkat ke-15 (lima belas) termahal. Semakin tinggi angka IKK suatu kabupaten, maka semakin mahal biaya yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di kabupaten tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kota Sibolga, nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah 5,31 poin. Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kota Sibolga 1,05 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Tapanuli Tengah. Walaupun jarak antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak jauh, namun Kota Sibolga tidak memiliki sumber bahan galian dasar sendiri untuk diproduksi, sehingga bahan bangunan dasar menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkembangan harga komoditas konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang relatif lambat dibandingkan Kota Sibolga juga menjadi faktor yang menyebabkan IKK Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah dibanding Kota Sibolga.

Berbeda dengan Kota Sibolga, IKK Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan indeks 97,88. Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa biaya membangun 1 (satu) unit bangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 1,002 kali lebih mahal dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berikut disajikan grafik nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan tahun 2014-2015:

Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014-2015



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 102,54. Jika dibandingkan dengan IKK Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi acuan, angka ini lebih tinggi dengan selisih 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Provinsi Sumatera Utara 1.03 kali lebih mahal dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan tabel Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia pada tahun 2015:

Tabel 2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia Tahun 2015

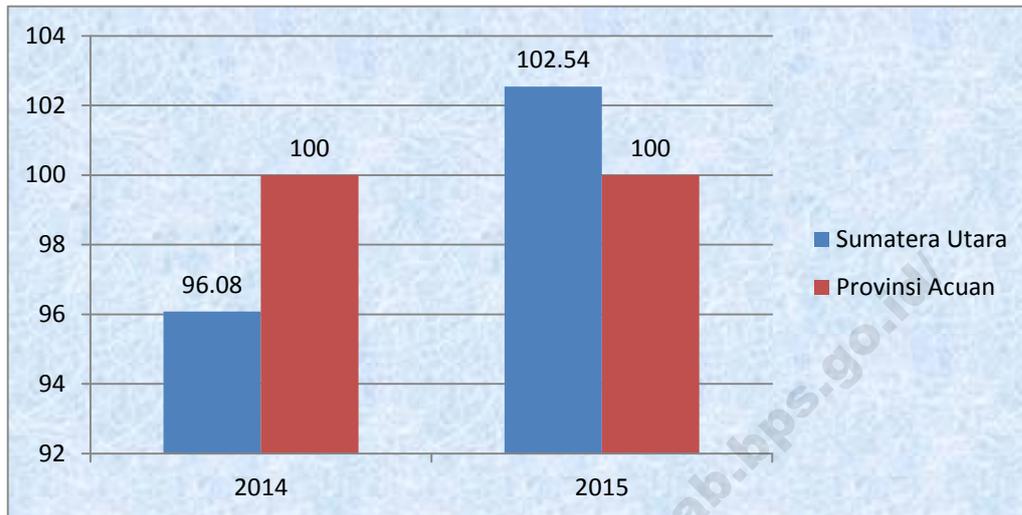
NO	KODE	PROVINSI	IKK*	RANKING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11	NANGROE ACEH DARUSSALAM	97,74	27
2	12	SUMATERA UTARA	102,54	20
3	13	SUMATERA BARAT	103,01	18
4	14	RIAU	104,97	15
5	15	JAMBI	96,64	30
6	16	SUMATERA SELATAN	105,12	14
7	17	BENGGULU	101,64	22
8	18	LAMPUNG	97,57	29
9	19	BANGKA BELITUNG	104,90	16
10	21	KEPULAUAN RIAU	122,33	5
11	31	DKI JAKARTA	110,13	11
12	32	JAWA BARAT	101,09	23
13	33	JAWA TENGAH	95,99	32
14	34	DI YOGYAKARTA	99,06	25
15	35	JAWA TIMUR	100,00	24
16	36	BANTEN	101,82	21
17	51	BALI	110,10	12
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	91,80	34
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	97,59	28
20	61	KALIMANTAN BARAT	118,87	8
21	62	KALIMANTAN TENGAH	110,99	9
22	63	KALIMANTAN SELATAN	102,92	19
23	64	KALIMANTAN TIMUR	119,06	7
24	65	KALIMANTAN UTARA	129,56	3
25	71	SULAWESA UTARA	110,61	10
26	72	SULAWESI TENGAH	92,49	33
27	73	SULAWESI SELATAN	96,38	31
28	74	SULAWESI TENGGARA	105,85	13
29	75	GORONTALO	103,05	17
30	76	SULAWESI BARAT	98,46	26
31	81	MALUKU	119,45	6
32	82	MALUKU UTARA	125,78	4
33	91	PAPUA BARAT	146,01	2
34	94	PAPUA	247,91	1

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

Jika dilihat dari tabel diatas, maka 3 (tiga) provinsi yang mewakili indeks terbesar adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan indeks

masing-masing 247,91; 146,01; dan 129,56. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Jawa Tengah merupakan 3 (tiga) provinsi dengan angka indeks terendah dengan nilai masing-masing 91,80; 92,49; dan 95,99. Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat ke-20 (dua puluh) tertinggi dari 34 provinsi.

Grafik 2.3 IKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

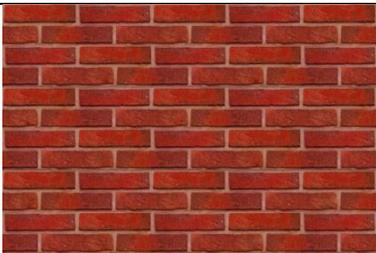
Sejak tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan IKK jika dibandingkan dengan provinsi acuan. IKK Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 96,08 dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan, dan tahun 2015 sebesar 102,54 dengan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi acuan. Secara sederhana, peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan peningkatan harga barang-barang konstruksi selama waktu 2014-2015 di Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan harga barang konstruksi rata-rata nasional.

LAMPIRAN 1

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>



**Lampiran 1. Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan
Sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2015**

Jenis Barang	Gambar	Keterangan
Pasir Pasang		
Batu Kali Utuh/Belah		
Batu Bata		
Batako		

Batu Split		
Semen Abu-abu		
Keramik Polos		
Kayu Papan		
Kayu Balok		

Kayu Lapis		
Cat Tembok		
Cat Kayu/Besi		
Besi Beton		
Seng Plat		

<p>Seng Gelombang</p>		
<p>Kaca Bening</p>		
<p>Pipa PVC</p>		
<p>Aspal</p>		
<p>Excavator</p>		

<i>Buldozer</i>		
<i>Three Wheel roller</i>		
<i>Dump Truck</i>		

LAMPIRAN 2

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>



Lampiran 2. Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK Tahun 2015



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI
SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK
PERIODE : JANUARI 2015**

VIKK2015

PENJELASAN	
1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.	
2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuriran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.	
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari pengganti yang sesuai.	
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.	
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka akan dicari pengganti yang setara.	
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke slpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.	
7. Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.	
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.	

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT			
1. Provinsi	Sumatera Utara	1	2
2. Kabupaten / Kota	Tapanuli Tengah	0	4

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH			
1. Nama Pencacah		6. Nama Pengawas	
2. N I P Pencacah		7. N I P Pengawas	
3. Tanggal Pencacahan	4. Selesai Dientry Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
5. Tanda Tangan Pencacah		9. Tanda Tangan Pengawas	

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PERIODE : JANUARI 2016

Jenis Barang	Kualitas Barang	Kode	KODE RESP	KODE MERK	KODE MERK	KODE GALUNG	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan (dalam bentuk radali)	Ukuran Satuan setempat			Konversi satuan setempat ke standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tidak penting)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
											Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)						
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanah Ujung	Biasa						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
	Pasir Pasang (pasir laut, pasir kali)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Pasir	Pasir Beton / Cor (pasir gunung)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Pondasi	Batu Kali Belah						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Bata	Batu bata tanah liat (bata merah)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batako	Batako berlingkang (hollow block)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batako	Batako tidak berlingkang (solid block)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Bata Ringan	Celcon atau Hebel						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
	Ukuran 1 - 2 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
	Ukuran 2 - 3 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Split	Ukuran 3 - 4 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											

Kioset	Kioset duduk standar (lengkap dengan tabung)	Kioset jongkok	Kioset duduk standar (lengkap dengan tabung)			Kioset jongkok							
			I	II	III	I	II	III					
Seng Plat	Seng plat BULS 20 L=45	Seng plat BULS 20 L=60	I	II	III	I	II	III	I	II	III		
			m	m	m	buah	buah	buah	buah	buah	buah		
			II	III	I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah	
			III	I	II	III	I	II	III	buah	buah	buah	
			I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	
Pipa PVC	AW φ 1 1/2" panjang 4 m	AW φ 3/4" panjang 4 m	AW φ 1" panjang 4 m	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
				buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	
				II	III	I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah
				III	I	II	III	I	II	III	buah	buah	buah
				I	II	III	buah						
Pipa PVC	AW φ 4" panjang 4 m	D φ 3" panjang 4 m	D φ 4" panjang 4 m	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
				buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	buah	
				II	III	I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah
				III	I	II	III	I	II	III	buah	buah	buah
				I	II	III	buah						
Kayu Balok	Kayu kelas I	Kayu kelas II	Kayu kelas III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
				m ³	m ³	m ³	buah	buah	buah	buah	buah	buah	
				II	III	I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah
				III	I	II	III	I	II	III	buah	buah	buah
				I	II	III	buah						
Kayu Papan	Kayu kelas I	Kayu kelas II	Kayu kelas III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
				m ³	m ³	m ³	buah	buah	buah	buah	buah	buah	
				II	III	I	II	III	buah	buah	buah	buah	buah
				III	I	II	III	I	II	III	buah	buah	buah
				I	II	III	buah						

PELUELASAN PENGISIAN BLOK III	
<p>TANAH URUG PASIR BATU PONDASI BATU SPLIT</p> <p>Satuan standar untuk barang-barang ini adalah m³. Jika harga yang diperoleh sudah dalam m³ maka isi kolom 7,8,9 dengan angka 1 dan isikan harga per m³ pada kolom 12. Jika satuan peracahan tidak standar (truk/okup) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak yang berisi kemudian harga yang dicatat per satuan sbb pada kolom 12.</p> <p>BATU BATA BATAKO</p> <p>Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.</p> <p>SEMEN PORTLAND CAT EMULSI</p> <p>Pilih ketiga barang ini berdasarkan peringkat merek. Isikan merek pada kolom 5, berat per kemasan di kolom 10, dan harga per kemasan pada kolom 12.</p> <p>BESI BETON, BPA PVC</p> <p>Untuk PPA, PVC utamakan meracah sesuai dengan peringkat merek. Isikan panjang PPA, PVC atau BESI BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.</p> <p>KAYU BALOK KAYU PAPAN</p> <p>Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m³. Jika peracahan barang sbb sudah dalam satuan m³ maka isikan kolom 7,8,9 dengan angka 1 kemudian isikan harga per m³ pada kolom 12. Jika kayu per lembar maka isikan panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7,9. Isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m³ (1 ton = ...m³), sedangkan kolom 7,9 dikosongkan. Harga yang dicatat pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.</p>	<p>KACA GYPSUM</p> <p>Utamakan meracah sesuai dengan peringkat merek. Tuliskan merek pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/gypsum pialon per lembar (dalam meter) pada kolom 7,8. Tuliskan harga kaca/gypsum pialon per lembar pada kolom 12.</p> <p>KABEL</p> <p>Satuan standar kabel adalah meter. Jika kabel dijual per meter maka isikan kolom 7 dengan angka 1 dan tuliskan harga kabel per meter pada kolom 12. Jika kabel dijual per rol maka isikan panjangnya pada kolom 7 kemudian tuliskan harga kabel per rol pada kolom 12.</p> <p style="text-align: center;">PENEGASAN PENGACAHAN IKK</p> <p>1. PENGACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT, BATU BATA, BATAKO, KUSEN) DIPERBOLEHKAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI BIKOTA KABUPATEN TANGKUBERA.</p> <p>2. PENGACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS READY STOCK.</p> <p>3. UNTUK PENGACAHAN IKK TRIMULAN IV TAHUN 2014, TRIMULAN I TAHUN 2015 DAN TRIMULAN BERIKUTNYA, PEMILIHAN KUALITAS/SERVIS/FAKSI BARANG HARUS SAMA.</p> <p>4. UNTUK SEMUA ALAT BERAT PADA BLOK 4, DI KOLON KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEMUA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.</p>

BLOK IV : DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (001) 1 BULAN (002) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Exkavator PC-200	4442600001011001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	I	002 200 JAM			
	4442600001012001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	II	002 200 JAM			
	4442600001013001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	III	002 200 JAM			
Exkavator PC-200	4442600001012002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I	002 200 JAM			
	4442600001013002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	II	002 200 JAM			
	4442600001013003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	III	002 200 JAM			
Buldozer D-65	4442100001011001	Universal Blade (U-Blade)	I	002 200 JAM			
	4442100001013001	Universal Blade (U-Blade)	II	002 200 JAM			
	4442100001013002	Straight Blade (S-Blade)	III	002 200 JAM			
Buldozer D-65	4442100001012002	Straight Blade (S-Blade)	I	002 200 JAM			
	4442100001013002	Straight Blade (S-Blade)	II	002 200 JAM			
	4442100001013005	Bowl Dozer	III	002 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	4442300001011001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	II	002 200 JAM			
	4442300001013001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	III	002 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	4442300001011002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	II	002 200 JAM			
	4442300001013002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	III	002 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	4442300001011003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	II	002 200 JAM			
	4442300001013003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	III	002 200 JAM			
Tandem/Vibrating Roller	4442400001011001	8 - 10 ton	I	002 200 JAM			
	4442400001012001	8 - 10 ton	II	002 200 JAM			
	4442400001013001	8 - 10 ton	III	002 200 JAM			
Dump Truck	4442801000011001	Kapasitas 20 ton (tronton)	I	002 200 JAM			
	4442801000012001	Kapasitas 20 ton (tronton)	II	002 200 JAM			
	4442801000013001	Kapasitas 20 ton (tronton)	III	002 200 JAM			
Dump Truck	4442801000011002	Kapasitas 12 ton (angkel)	I	002 200 JAM			
	4442801000013002	Kapasitas 12 ton (angkel)	II	002 200 JAM			
	4442801000011003	Kapasitas 12 ton (angkel)	III	002 200 JAM			
Dump Truck	4442801000012003	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	I	002 200 JAM			
	4442801000012003	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	II	002 200 JAM			
	4442801000013003	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	III	002 200 JAM			

Motor Grader	4442201000011001	< 100 HP	I					
	4442201000012001		II	002	200 JAM			
	4442201000013001		III	002	200 JAM			
	4442201000011002	> 100 HP	I		001	1 BULAN		
	4442201000012002		II					
	4442201000013002		III					
Asphalt Finisher	4442901000011001		I					
	4442901000012001		II	002	200 JAM			
	4442901000013001		III	002	200 JAM			
Generator set	4611301001011001	60 KVA	I					
	4611301001012001		II	002	200 JAM			
	4611301001013001		III	002	200 JAM			
	4611301001011002	40 KVA	I					
	4611301001012002		II					
	4611301001013002		III					
	4611301001011003	20 KVA	I					
	4611301001012003		II					
	4611301001013003		III					
JASA KONSTRUKSI								
Upah Kepala Tukang	600000200001100		I		O-H			
	600000200001200		II		O-H			
	600000200001300		III		O-H			
Upah Tukang Batu	600000300001100		I		O-H			
	600000300001200		II		O-H			
	600000300001300		III		O-H			
Upah Tukang Kayu	600000300003100		I		O-H			
	600000300003200		II		O-H			
	600000300003300		III		O-H			
Upah Instalatr Listrik	600000600001100		I		Titik/OH			
	600000600001200		II		Titik/OH			
	600000600001300		III		Titik/OH			
Upah Pembantu Tukang	600000700001100		I		O-H			
	600000700001200		II		O-H			
	600000700001300		III		O-H			

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<http://tapanulitengahkab.bps.go.id/>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jl. N. Daulay, Pandan, Sumatera Utara 22611
Telp:(0631) 371082, Fax: (0631) 372066
Homepage: <http://tapanulitengahkab.bps.go.id>
E-mail: bps1204@bps.go.id

ISBN 978-602-1113-91-2



9

786021

113912